

KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Muhammad Rusadi¹, Muhamad Arsyad², Saidah Hasbiyah³

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email: Sadiwara01@gmail.com

ABSTRAK

Fenomena masalah pada Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain, masih tingginya angka ODGJ di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kurangnya pegawai Dinas Sosial khususnya dalam penanganan ODGJ, serta masih belum adanya fasilitas khusus seperti tempat penitipan sementara dan kurangnya anggaran bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara purposive sampling dari 12 orang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial dalam penanganan ODGJ di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik. Kinerja yang baik dilihat dari aspek tanggung jawab. Aspek yang cukup baik yaitu kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat, pengembangan program dan kesesuaian layanan yang sesuai peraturan. Dan aspek yang belum baik dilihat dari efektivitas, efisiensi, kepuasan masyarakat, kesesuaian layanan dengan kebutuhan masyarakat. Saran Penulis kepada pemerintah daerah agar meningkatkan alokasi anggaran, kepada Kepala Dinas Sosial agar melakukan rekrutmen pegawai dan juga melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait pelaporan keberadaan ODGJ yang meresahkan, kepada pihak keluarga ODGJ agar bekerja sama dengan Dinas Sosial.

Kata Kunci: Kinerja, Dinas Sosial, Penanganan, ODGJ.

ABSTRACT

Problem phenomena in Hulu Sungai Utara Regency Social Service is still high number of PWMD in Hulu Sungai Utara Regency, the lack of Social Service employees especially in handling PWMD, and the lack facilities such as temporary care and lack of aid budget. This research aims to determine the performance of the Social Service in handling PWMD. This research uses a qualitative approach with a descriptive-qualitative. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data source was taken through purposive sampling of 12 people. The results research show the performance of Social Service in handling PWMD in Hulu Sungai Utara Regency is quite good. Good performance is seen from aspect responsibility. Aspects that are quite good are the organization's ability to recognize community needs, program development and suitability of services according to regulations. Aspects that aren't good can be seen from effectiveness, efficiency, community satisfaction, suitability of services to community needs. Author's suggestions for local governments to increase budget allocations, to Head of the Social Service to recruit employees and also carry out comprehensive outreach to the community regarding reporting of the disturbing presence of PWMD, for families of PWMD to cooperate with the Social Service.

Keywords: Performance, Social Services, Handling, PWMD.

PENDAHULUAN

Gangguan jiwa merupakan salah satu permasalahan kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia terkhususnya Kabupaten Hulu Sungai Utara. Gangguan jiwa merupakan kumpulan dari keadaan yang tidak normal baik secara fisik maupun mental. Gangguan jiwa dalam berbagai bentuk adalah penyakit yang sering dijumpai pada semua lapisan masyarakat. Kesehatan jiwa adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan atau bagian integral dan merupakan unsur utama dalam menunjang terwujudnya kualitas hidup manusia yang utuh. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) adalah seseorang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang terwujud dalam bentuk sekumpulan gejala atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan, dan hambatan

dalam menjalankan fungsi sebagai manusia. Menurut peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang penyandang disabilitas:

1. Memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas sebagai bentuk pemenuhan dan tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapat hak dan kesempatan yang setara.
3. Untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undang yang lebih tinggi.

Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki bidang khusus menangani hal ini. Bidang tersebut adalah Bidang Rehabilitas Sosial bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

METODE

A. Masalah Yang Diteliti

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara?

B. Sasaran Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian ini sendiri adalah untuk memperoleh data. Dalam hal ini teknik pengumpul data yang paling banyak berperan yaitu:

1. Interview (Wawancara)
2. Dokumentasi
3. Observasi (Pengamatan)

D. Teknis Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2022:132-142) mengungkapkan bahwa dalam mengolah data kualitatif dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yaitu:

1. Pengumpulan Data
2. Reduksi Data
3. Penyajian Data
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

PEMBAHASAN

A. Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang ataupun kelompok orang-orang yang dalam satu organisasi, yang sesuai dengan wewenang dan kewajiban masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi. Kinerja merupakan tingkat pencapaian tugas dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan, visi misi, sasaran organisasi tersebut, seberapa jauh organisasi hasil kerja dibandingkan dengan pencapaian tujuan dan target yang telah ditentukan. Kinerja merupakan suatu pencapaian hasil kerja dalam kegiatan atau aktivitas yang sudah direncanakan sebelumnya untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh organisasi yang akan dilaksanakan dalam batas waktu tertentu.

1. Produktivitas
 - a. Efektifitas

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dalam mengukur indikator efektifitas. Kinerja Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik karena masih tingginya kasus ODGJ yang menyebabkan tidak meratanya penyaluran bantuan, karena dari 214 orang yang terdata hanya 82 orang yang mendapat bantuan.

- b. Efisiensi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam mengukur indikator efisiensi. Kinerja Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik karena masih kurangnya anggaran yang menyebabkan penyaluran bantuan yang tidak merata, masih belum adanya fasilitas khusus untuk menangani ODGJ dan masih kurangnya pegawai khusus yang menangani ODGJ.

2. Kualitas Pelayanan

- a. Kesesuaian layanan dengan kebutuhan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam mengukur indikator kesesuaian layanan dengan kebutuhan. Kinerja Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik, karena beberapa keluarga ODGJ masih belum merasakan dampak dari pelayanan Dinas Sosial. Hal ini disebabkan karena belum meratanya pemberian bantuan.

- b. Kepuasan masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam mengukur indikator kepuasan masyarakat. Kinerja Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum baik, karena menurut beberapa informan dari keluarga ODGJ tidak mendapat bantuan tunai ataupun kesehatan dan masih adanya ODGJ yang berkeliaran dan meresahkan masyarakat.

3. Responsivitas**a. Kemampuan Organisasi Dalam Mengenali Kebutuhan Masyarakat.**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam mengukur indikator kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Kinerja Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik. Walaupun pemberian bantuan belum merata karena kurangnya anggaran, Dinas sosial dalam hal mengenali kebutuhan masyarakat dilakukan dengan cukup baik, dengan melakukan monitoring setiap 6 (enam) bulan sekali.

b. Mengembangkan Program Dan Layanan Sesuai Dengan Kebutuhan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengukur indikator mengembangkan program dan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kinerja Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik. Walaupun masih belum ada pengembangan program dan juga layanan yang diberikan masih belum bisa mencakup seluruh ODGJ. Layanan Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah mencakup penanganan, pendampingan, dan pemberian bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

4. Responsibilitas**a. Kesesuaian Pelayanan Dengan Kebijakan Oraganisasi**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dalam mengukur indikator kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat. Kinerja Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik. Walaupun prosedur masih belum bersifat tetap, namun dilakukan dengan baik sesuai dengan SOTK Dinas Sosial dan dalam hal penyaluran bantuan dilakukan dengan prosedur yang ada.

5. Akuntabilitas**a. Tanggung Jawab**

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mengukur indikator tanggung jawab. Kinerja Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah baik, karena Dinas Sosial sudah menjalankan fungsi dan kewajiban secara bertanggung jawab. Dan dari dokumentasi yang diperoleh penyandang disabilitas yang menerima pelayanan dasar di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah terpenuhi, sehingga dari permohonan yang masuk 100% dapat dilayani.

**Capaian Kinerja SPM Tahun 2022
Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara**

| No | Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM | Indikator Pencapaian / Output | Total Pencapaian |
|----|--|-------------------------------|------------------|
| | Kategori indeks pencapaian SPM | | |
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | | |

| | Persentase pencapaian penerima layanan dasar (80%) | Jumlah Total Harus Dilayani | Jumlah Total Terlayani | Yang Belum Terlayani | |
|--|--|-----------------------------|------------------------|----------------------|--|
| | A. Jumlah yang harus dilayani: | 250 | 250 | 0 | |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara, 29 November 2023

B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kabupaten Hulu Sungai Utara

1. Faktor Pendukung

- a. Minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan keberadaan ODGJ yang meresahkan masyarakat
- b. Kurangnya anggaran pemerintah untuk membantu Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Faktor Penghambat

- a. Sudah optimalnya kerjasama antara instansi terkait penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa
- b. Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang sudah sesuai prosedur.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara cukup baik. Indikator yang baik adalah tanggung jawab karena Dinas Sosial sudah melakukan penangan dan penyaluran bantuan sesuai dengan fungsi dan tugas yang diberikan. Adapun indikator yang cukup baik ada 3 (tiga). Pertama, kemampuan organisasi dalam mengenali kebutuhan masyarakat cukup baik karena walaupun penyaluran bantuan masih belum merata Dinas sosial secara rutin melakukan *monitoring*. Kedua, pengembangan program atau layanan cukup baik karena walaupun masih belum ada pengembangan program, namun ada peningkatan layanan. Ketiga, kesesuaian layanan yang sesuai peraturan cukup baik karena prosedur penanganan yang dijalankan masih belum bersifat tetap. Adapun indikator yang belum baik meliputi efektifitas, efisiensi, kepuasan masyarakat, dan kesesuaian layanan dengan kebutuhan. Pertama efektifitas belum baik karena penyaluran bantuan yang belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat karena dari 214 Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terdata hanya 82 orang yang mendapat bantuan. Kedua, efisiensi belum baik karena dalam kegiatan penyaluran dan penanganan masih belum berjalan dengan hasil yang baik karena kurangnya anggaran, fasilitas dan pegawai. Ketiga, kesesuaian pelayanan dengan kebutuhan belum baik karena penyaluran bantuan yang masih belum merata, Keempat kepuasan masyarakat belum baik karena masih banyaknya beberapa keluarga dari Orang Dengan Gangguan Jiwa yang belum mendapat bantuan dari Dinas Sosial.
2. Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara ada dua yaitu faktor penghambat dan faktor pendorong. Faktor penghambat meliputi minimnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan terkait keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang meresahkan dan masih kurangnya anggaran yang diberikan pemerintah untuk membantu keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa, yang mana dua faktor ini cukup menghambat kinerja Dinas Sosial dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa di

kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menapai tujuan yang diharapkan. Adapun faktor pendorong kinerja Dinas Sosial dalam menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang sudah sesuai dengan prosedur dan sudah optimalnya kerjasama antar instansi terkait penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa.

3. Upaya yang dilakukan Dinas Sosial dalam mengatasi hambatan terkait masalah kurangnya anggaran pemerintah dalam memberikan bantuan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah dengan melakukan optimalisasi anggaran untuk mengalokasikan dana kepada mereka yang lebih membutuhkan. Selain itu, pencairan dana bantuan dilakukan secara bertahap supaya uang bantuan digunakan untuk kebutuhan dasar. Upaya lain yang dilakukan Dinas Sosial untuk mengatasi hambatan minimnya partisipasi masyarakat terkait pelaporan keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang meresahkan adalah dengan melakukan himbauan atau sosialisasi langsung kepada masyarakat, yang mana sosialisasi ini diharapkan agar masyarakat lebih membantu Dinas Sosial dalam penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2021. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 *Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Adinda*, N.W. (2017) 'Upaya Dinas Sosial Kabupaten Jember Terhadap Perlindungan Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Universitas Islam Fakultas Syariah Negeri Jember.'
- Anonim (2018) 'Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Sosial Kabupaten Hulu Sungai Utara.'
- Anonim (2021) 'Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Kabupaten Hulu Sungai Utara'.
- Budiyanto, E. dan M.M. (2020) *Kinerja Karyawan Ditinjau dari Aspek Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja*. Banten: CV. AA. Rizky. Banten: CV. AA. Rizky.
- Dwiyanto, Agus, dkk (2012) *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fiantika, F.R.E. al (2022) *Metode Penelitian Kualitatif, Sumatra Barat: P.T Global Eksekutif Teknologi*. Sumatra Barat: P.T Global Eksekutif Teknologi.
- Gustaman, A.G. (2023) 'Kesehatan Jiwa. Malang: Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Diakses 11 Desember 2023.' Available at: <https://rsjrjw.id/artikel/kesehatan-jiwa>. .
- Hartati, A.E. al. (2020) *Pengukuran Kinerja Sektor Publik (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung: Media Bandung Indonesia. Bandung: Media Bandung Indonesia.
- Haryoko, Sapto. Bahartiar dan Arwadi, F. (2020) *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Makassar: Universitas Negeri Makassar. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Hayat (2017) *Manajemen Pelayanan Publik*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persabda.
- Huseno, T. (2016) *Kinerja Pegawai Tinjauan dari Dimensi Kepemimpinan, Misi Organisasi, Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja*. Malang: Media Nusa Creative.
- Kaukabun, D. (2023) 'Kinerja Dinas Sosial Dalam Penanganan Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Pada Kecamatan Barabai, Kecamatan Pandawan, Dan Kecamatan Batang Alai Selatan) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.'



- Khaeruman (2021) *Meningkatkan Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia*. Banten: CV. AA. Rizky.
- Panjaitan, M.E. al. (2023) *Manajemen Kinerja (Perspektif Balanced Scorecard)*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Pasolong, H. (2017) *Teori Administrasi Publik*. Makassar: Alfabeta.
- Silaen, N.R.E. al. (2021) *Silaen, Novia Ruth. Et al. 2021. Kinerja Karyawan. Bandung: Widina Bhakti Persada Bnadung*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bnadung.
- Sugiyono (2013) *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung : Alfabeta*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun (2023) *Pedoman Penyusunan Skripsi STIA Amuntai*. amuntai.